



PUTUSAN

Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3403015501850001, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, Tempat XXXXXXX, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di XXXXXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register Nomor 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr, tanggal 01 Juli 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul,

Hlm 1 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi D.I Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tertanggal 05 Mei 2021;

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Janda cerai hidup dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dan status Tergugat adalah Duda cerai hidup dan telah memiliki 2 (dua) orang anak ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di XXXXX dirumah milik Penggugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire dan bertempat tinggal di XXXXX, di rumah kontrakan selama 1 bulan;
4. Bahwa, selama menikah, Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (ba'dha dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awal bulan April tahun 2017 Tergugat izin ke Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan di Jakarta;
6. Bahwa, satu minggu setelah itu Penggugat mencoba menghubungi Tergugat melalui *HandPhone* Tergugat akan tetapi tidak ada jawaban dari Tergugat, dan sejak saat itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi hingga sekarang;
7. Bahwa, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri hingga sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dimasa yang akan datang dengan Tergugat.
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Hlm 2 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini. Dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat Ta'lik terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak Satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000.00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Cq. Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyerahkan Kartu Identitas kemudian diverifikasi oleh Hakim ternyata memiliki kecocokan dengan Identitas yang tertera dalam Surat Gugatan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Hlm 3 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta Nomor XXXXX, Tertanggal 05 Mei 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. Nama SAKSI, Umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXX di rumah milik Penggugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire dan bertempat tinggal di XXXXX, di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak April tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui di Akhir bulan april tahun 2017 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama SAKSI, Umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang , tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Nabire, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di XXXXX di rumah milik Penggugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire dan bertempat tinggal di XXXXX, di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
- Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak April tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui di Akhir bulan april tahun 2017 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulanya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Hlm 5 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat semula bertempat tinggal di XXXXX, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, berdasarkan surat Pernyataan Penggugat yang diketahui oleh Ketua RT, dan Ketua RW serta Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, disebabkan hanya Penggugat yang hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidakhadiran Tergugat dipandang tidak mempunyai alasan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara dapat diperiksa serta dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*)

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

Hlm 6 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak April tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Tergugat di persidangan, Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin membantah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

Hlm 7 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr



البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada penggugat sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar”. (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, Tertanggal 05 Mei 2021 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen dengan materai cukup, sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta Tertanggal 05 Mei 2021 oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Hlm 8 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Nabire, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Nabire berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti penggugat yang telah diperiksa, dihubungkan dengan dalil dan alasan Penggugat serta penjelasan Penggugat sendiri atas gugatannya dalam proses persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Januari 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Distrik Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, Tertanggal 05 Mei 2021 dimana pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup Cerai dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah Tersebut
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di XXXXX di rumah milik

Hlm 9 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat selama 1 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat merantau ke Nabire dan bertempat tinggal di XXXXX;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, namun sejak April tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
6. Bahwa di Akhir bulan april tahun 2017 disebabkan permasalahan yang sama Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat-Tergugat sehingga sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak rukun lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga dan orang terdekat sudah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 3 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan sikap Penggugat yang menunjukkan tekad dan bertetapan hati untuk bercerai, Majelis dapat menyimpulkan apa yang didalilkan Penggugat telah terbukti dan rumah tangga yang demikian sudah retak (Marriage Break Down) sehingga menjadi petunjuk bagi majelis bahwa rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dirukunkan lagi, keadaan tersebut apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah sebagaimana

Hlm 10 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan, terutama bagi Penggugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya atas adanya pelanggaran sighthot ta'lik talak, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti adanya pelanggaran ta'lik talak terhadap Tergugat atas Penggugat, oleh karenanya harus dinyatakan Tergugat telah melanggar janji/ sighthot ta'lik talak pada angka 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa demikian halnya syarat alternatif dari isi taklik talak yang harus dipenuhi Penggugat, yaitu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan dan Penggugat telah menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka Hakim harus menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar Shighat taklik talak yang pernah diucapkannya setelah akad nikah (bukti P.1) dalam hal ini taklik talak angka (2) dan (4), sehingga syarat alternatif dari janji taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah melaksanakan akad nikah telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan upaya damai tidak berhasil, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat atas dasar pelanggaran taklik talak cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun kepadanya telah

Hlm 11 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan menyatakan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat kepada Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan *Iwadh* sebesar Rp.10.000,- (*Sepuluh ribu rupiah*);
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **IKBAL FAHRI HASAN, S.H** sebagai Hakim dengan dibantu oleh **MARKISA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm 12 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr



Panitera Pengganti,

Hakim,

MARKISA, S.HI

IKBAL FAHRI HASAN, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,00
4. Biaya PBT	Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
7. Biaya PNB	Rp.	30.000,00
Jumlah	Rp.	510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm. Put 121/Pdt.G/2021/PA.Nbr